

PENONAKTIFAN SEMENTARA SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, SE BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD HASIL PEMILIHAN TAHUN 2014 SAMPAI 2019

(Kajian tentang Etika Kepemimpinan Pemerintahan)

Gryfid Joysman Talumedun¹

Ronny Gosal²

Alfon Kimbal³

Abstrak

Etika berkaitan dengan kepemimpinan yaitu dengan apa yang dilakukan pemimpin dan siapakah pemimpin itu, hal ini terkait dengan karakter perilaku pemimpin, dan dengan integritas mereka, dalam situasi pembuatan keputusan apapun, masalah etika terlibat secara eksplisit maupun implisit. Pilihan yang dibuat pemimpin dan bagaimana mereka merespon dalam situasi tertentu, diinformasikan dan diarahkan oleh etika mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui etika kepemimpinan pemerintahan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, SE dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa dilihat dari proses penonaktifan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, SE melalui Surat Keputusan Penonaktifan sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ditemukan bahwa penonaktifan tersebut sudah sesuai dengan Aturan dan reulasi yang ada serta sudah melalui Pertimbangan dan Aspek penilaian. Berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana terdapat beberapa masalah dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa indikator sebagaimana yang di kemukakan oleh Bertens bahwa etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kata Kunci : Etika, Penonaktifan Sementara, Bupati.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemimpin yang beretika tidak akan pernah punya niat untuk menyingkirkan bakat-bakat hebat yang menjanjikan masa depan cerah. Dia akan mengilhami semua orang dengan motivasi dan keteladanan untuk mampu mencapai keunggulan, dan merangsang semua orang untuk berfikir positif dan bekerja efektif. Salah satu pelanggaran etika seorang kepala daerah ialah tidak melaksanakan Segala sesuatu sesuai dengan aturan Perundang-undangan. Satu dari sekian banyak kepala Daerah yang terjerat kasus pelanggaran Etika serta tidak melaksanakan peraturan sesuai undang-undang pemerintahan Daerah ialah Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, SE yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Aturan baru kepala daerah tertuang dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016. Isinya didalam Pasal 10 bahwa Bupati/Walikota haruslah mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur. Selanjutnya Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri disertai dengan alasan.

Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. Drs. Sinyo Harry Sarundajang pada 20 Juli 2014 berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.71-3202 dan SK Mendagri Nomor 132.71-3203 tertanggal 2 Juli 2014

tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2014–2019. Bupati Sri Wahyumi Manalip juga merupakan perempuan pertama yang berhasil menduduki kursi orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Talaud. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip makin dikenal saat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengunjungi dan meresmikan Bandar Udara di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud pada 19 Oktober 2016.

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mendapat teguran dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip pada tanggal 31 Oktober 2017. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip Melanggar aturan dengan bepergian ke luar negeri tanpa izin Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Sri Wahyumi Manalip pergi untuk menghadiri International Visitor Leadership Program (IVLP) Pada Bulan Desember, Setelah itu Kemendagri menindaklanjuti laporan Pemprov Sulut dengan menurunkan Tim investigasi dan Verifikasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan menyatakan Bupati Kepulauan Talaud dinyatakan Bersalah karena kunjungan yang dilakukannya ke Amerika Serikat tersebut tidak mempunyai izin atasannya.

Kajian Pustaka

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan

konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika memberi suatu sistem pengaturan dan prinsip yang memandu kita dalam membuat keputusan tentang apa yang benar dan salah, serta baik atau buruk dalam situasi tertentu Peter G. Northouse, (2017:403-409). Hal ini memberikan dasar untuk pemahaman tentang apa yang dimaksud sebagai manusia yang baik secara moral. Teori Etika ketika diterapkan untuk kepemimpinan adalah tentang pemimpin dan diri mereka sebagai orang. Etika kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Pengertian Etika Menurut K. Bertens (2013:107-112): Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia.

Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi enam prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran.

1) Prinsip Keindahan

Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja.

2) Prinsip Persamaan

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun.

3) Prinsip Kebaikan

Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat-menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.

4) Prinsip Keadilan

Kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain

5) Prinsip Kebebasan

Sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disini diartikan sebagai:

- Kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan.
- Kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut.
- Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6) Prinsip Kebenaran

Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses. Kepemimpinan dapat juga diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pengertian

pemimpin adalah suatu peran atau ketua dalam sistem di suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Pengertian Kepemimpinan menurut Ahli ialah sebagai berikut :

1. Wikipedia : Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
2. Tead, Terry, Hoyt (dalam Kartono, 2008): Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.
3. Young (dalam Kartono, 2008): Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.
4. Moejiono (2007): Leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpi

Etika kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum

oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kepemimpinan tanpa etika adalah malapetaka karena dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kehancuran. Seorang pemimpin wajib untuk memimpin dengan berpondasikan etika yang kuat dan santun. Sebab, tanpa etika kepemimpinan, maka pemimpin tidak akan pernah mampu menyentuh hati terdalam dari para pengikut.

Seorang pemimpin yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Dan bukan seorang pemimpin yang menciptakan jarak antara mimpi dan realitas. Tetapi dia seorang pemimpin beretika yang membantu semua mimpi pengikutnya menjadi kenyataan dalam kebahagiaan.

Pemimpin yang beretika tidak akan pernah punya niat untuk menyingkirkan bakat-bakat hebat yang menjanjikan masa depan cerah. Dia akan mengilhami semua orang dengan motivasi dan keteladanan untuk mampu mencapai keunggulan, dan merangsang semua orang untuk berfikir positif dan bekerja efektif. Sedangkan Etika pemerintahan itu sendiri adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia.

Secara umum dapat dimaknai bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan atau secara operasional dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dibidang pemerintahan. Pamudji (2005:52)

berpendapat dalam hubungannya dengan kepemimpinan pemerintahan Indonesia terdapat pada setiap tingkat pemerintahan, Nasional/Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, kecamatan dan juga tingkat pemerintahan kelurahan/desa. Lebih lanjut jika pengertian ini dikaitkan dengan pemerintahan daerah maka kepemimpinan pemerintahan daerah adalah penerapan dasar-dasar kepemimpinan pada umumnya dalam sistem pemerintahan di daerah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Djopari dalam Widyapraja (2005:73). Melengkapi pendapat diatas Kaloh (2009:2) menjelaskan bahwa berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka Pemimpin Pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin pada ketiga cabang Pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Dari sisi lain pemimpin pemerintahan dapat dibedakan menjadi pemimpin politik yang tersusun secara hirarkis mulai dari Presiden yang dibantu para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa/Lurah dan Pemimpin yang menduduki jabatan Struktural yaitu mereka yang menduduki jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, III, IV.

Para pejabat politik dan pejabat structural digolongkan sebagai pemimpin pemerintahan karena mereka adalah actor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan perilaku yang bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat pada umumnya, siap mengorbankan diri demi membela

martabat, kehormatan dan kejayaan bangsa dan negaranya serta jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, boros, serakah, tidak dapat mengendalikan diri, dan sombong. Pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan figur yang menentukan keefektifan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:112), objek dalam penelitian ini kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Fokus penelitian ini menfokuskan pada Etika Kepemimpinan Pemerintahan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Penonaktifan Sementara Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, S.E yang dikaji menggunakan teori etika Kepemimpinan menurut K. Bertens bahwa Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Informan dalam penelitian ini melibatkan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sekretariat Daerah Pemprov Sulut, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Tokoh Adat, Masyarakat.

Hasil Penelitian

Memberikan pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam menilai sebuah cara memimpin seorang bupati yang adalah pimpinan di Kabupaten Kepulauan Talaud harus memenuhi kriteria dalam standar Etika Kepemimpinan Pemerintahan dari hal ini dapat dilihat bahwa Etika Kepemimpinan Pemerintahan yang ada harus murni dan sesuai dengan Etika Kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya, melainkan adalah salah satu sikap menguntungkan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Oleh sebab itu Etika bupati kabupaten kepulauan talaud sangatlah jauh dari konsep etika yang dikemukakan oleh Bertens, K. (2013).

Dari hal etika tersebut peneliti dapat menarik dua garis lurus sebagai factor yang dapat menunjukkan sebuah etika yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh K. Bertens ialah Nilai dan Norma – norma Moral yaitu Nilai adalah Suatu keyakinan Yang berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.

Moral diartikan sebagai pesan yang disampaikan atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah atau peristiwa. Pengertian moral pun cukup sederhana, yaitu mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam

perilaku manusia, dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang: sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut.

Adapun nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilanggar oleh Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, S.E ialah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai – nilai Pribadi seseorang Kepala daerah sebagai pedoman dalam kepala daerah tersebut dalam menjalankan pemerintahannya.

Nilai-nilai pribadi mengambil makna yang lebih besar di masa dewasa karena mereka dimaksudkan untuk mempengaruhi bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita kepada orang lain. Hal ini berlaku di tempat kerja, terutama bagi para manajer dan pemimpin, yang bertugas mengawasi sumber daya untuk kepentingan orang lain. Karena struktur mereka otoritas, norma sosial, dan budaya, organisasi dapat memiliki pengaruh kuat pada karyawan mereka. Pengusaha melakukan yang terbaik untuk menyewa individu yang sesuai cocok dengan baik dengan norma-norma dan nilai-nilai organisasi. Dengan cara ini mereka berusaha untuk mempromosikan standar mereka perilaku etis.

Sebaliknya, konflik dapat terjadi antara nilai-nilai moral individu dan apa yang dia merasakan menjadi orang lain dalam organisasi mereka. Karena pertimbangan moral didasarkan pada analisis konsekuensi dari perilaku, mereka melibatkan interpretasi dan penilaian. Orang mungkin akan diminta untuk melakukan sesuatu yang melanggar keyakinan pribadi tetapi dianggap tepat oleh orang lain. Untuk membuat pilihan etis dan moral, seseorang perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai pribadi

seseorang. Tanpa kesadaran itu, bisa sulit untuk membenarkan keputusan atas dasar etika atau moral dalam cara yang lain akan menemukan persuasif.

Kepemimpinan tanpa etika adalah malapetaka karena dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kehancuran. Seorang bupati yang pemimpin wajib untuk memimpin dengan berpondasikan etika yang kuat dan santun. Sebab, tanpa etika kepemimpinan, maka pemimpin tidak akan pernah mampu menyentuh hati terdalam dari para pengikut. Dan dia juga akan mnejadi yang gampang untuk di olok-olok oleh lawan dan kawan. Bila lawan, kawan, dan bawahan sudah suka meperolok-olokkan pemimpin, maka malapetaka akan menjadi sahabat kepemimpinan tersebut.

Seorang Kepala daerah yang memiliki etika akan mampu membawa Pemerintahan yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin. Seorang Kepala daerah haruslah menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh birokrasi yang dipimpinnya serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dan bukan seorang pemimpin yang menciptakan jarak antara mimpi dan realitas. Tetapi dia seorang pemimpin beretika yang membantu semua mimpi pengikutnya menjadi kenyataan dalam kebahagiaan.

Pemimpin yang beretika tidak akan pernah punya niat untuk menyingkirkan bakat-bakat hebat yang menjanjikan masa depan cerah. Dia akan mengilhami semua orang dengan motivasi dan keteladanan untuk mampu mencapai keunggulan, dan merangsang semua

orang untuk berfikir positif dan bekerja efektif.

Seorang Kepala daerah yang etis perilakunya mengacu pada norma-norma etika. Karakteristik perilaku etis antara lain:

1. Dapat dipercaya. Seorang Kepala daerah harus dapat dipercaya oleh para bawahannya serta masyarakatnya. Ia harus menjadi seorang yang jujur berupaya menyatukan antara apa yang dikatakan, dijanjikan dengan apa yang dilakukannya.
2. Menghargai dan menghormati orang lain yang mana seorang kepala daerah (Bupati) haruslah menghargai pimpinan atau atasannya (Gubernur). Pemimpin harus memperlakukan atasan serta bawahannya bahkan masyarakatnya dengan baik seperti ia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Pemimpin juga harus menghargai hak asasi para pengikut dan orang-orang yang berhubungan dengan organisasinya.
3. Bertanggung Jawab. Seorang Kepala daerah harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugasnya dan perannya dalam pemerintahannya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan serta cita – cita yang diharapkan oleh daerahnya.
4. Adil. Seorang Kepala daerah harus adil dalam melaksanakan peraturan tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, keluarganya dan kroninya.
5. Kewargaan organisasi. Seorang Kepala daerah melaksanakan tugas untuk membuat kehidupan serta pemerintahannya lebih baik, melindungi lingkungan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar birokrasi.

6. Menggunakan kekuasaannya secara bijak. Kepala daerah mempunyai berbagai jenis kekuasaan yang dapat dipergunakannya untuk memengaruhi para pengikutnya dan orang lain yang berhubungan dengan organisasinya. Maka berlaku bijaklah untuk menentukan segala sesuatu dan melakukan suatu kegiatan atau hal dengan melihat aturan dan regulasi yang ada sesuai dengan Undang – undang yang berlaku yang mengikat seorang Kepala daerah.

7. Jujur. Kepala daerah harus memegang prinsip kejujuran, ia harus jujur kepada dirinya sendiri, kepada para pengikutnya dan kepada orang yang berhubungan dengan organisasinya.

Pemimpin merupakan faktor penentu terciptanya perilaku etis dan iklim etika dalam organisasi. Pemimpin menyusun strategi pengembangan perilaku etis yang merupakan bagian dari strategi organisasi. Pemimpin menyusun kode etik organisasi dan melaksanakannya sebagai panduan perilaku para anggota organisasi. Dalam melaksanakan kode etik, pemimpin menjadi role model atau panutan perilaku etis.

Dalam konteks organisasi pemerintahan, etika beorganisasi dapat berarti pada sikap dan perilaku yang diharapkan dari seorang pimpinan atau kepala daerah itu sendiri, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi, yang sejalan dengan tujuan maupun maksud tujuan organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi pemerintah pola sikap dan perilaku serta hubungan antarmanusia dalam organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi, pada umumnya diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam sistem hukum negara yang ada. Bagi aparatur

pemerintah budaya dan etika kerja merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan pusat ataupun daerah, pada tingkat departemen atau organisasi dan unit-unit kerja dibawahnya. Bahwa setiap kepala daerah diikat oleh satu aturan yang ada yang mengatur hal – hal yang menjadi syarat administratif seorang kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya.

Adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat. Tujuan yang hakiki dari setiap pemerintah di negara manapun adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat warga negara yang bersangkutan. Walaupun demikian, pola atau cara-cara yang ditempuh dari perilaku pemerintah dalam hal itu berbeda dari satu negara ke negara lainnya, bergantung pada kondisi dan situasi yang berlaku di negara masing-masing.

Oleh sebab itu etika tidak akan terlepas dari aspek kepemimpinan mempunyai peranan sentral atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai suatu organisasi maka kedudukan pemimpin pemerintahan sangat strategis, pemimpin pemerintahan merupakan figur yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pemimpin pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menanggapi

dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat yang berlandaskan pada etika seorang pemimpin itu sendiri untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma–norma yang ada. Setiap pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi politik baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang datangnya dari masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan terhadap berbagai macam kebutuhan organisasi pemerintahan demi lancarnya pelayanan masyarakat kedepannya di Kabupaten Kepulauan Talaud tercinta. Karena seorang kepala daerah haruslah menjadi contoh dan teladan serta menjadi alat pemersatu dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menghargai Nilai–nilai penyelenggaraan pemerintahan dan Norma–norma moral yang terkandung di masyarakat. Oleh sebab itu Kepala daerah haruslah Beretika, karena dengan Menghargai dan mematuhi peraturan adalah awal wibawa seorang PNS, Pejabat dan Pemimpin itu dapat menjalankan Amanah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan sebaik–baiknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penonaktifan Sementara Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, S.E yang dikaji menggunakan teori K. Bertens bahwa Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dilihat dari proses penonaktifan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip, S.E melalui SK Penonaktifan sementara yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI ditemukan bahwa Penonaktifan tersebut sudah sesuai dengan Aturan dan reulasi yang ada serta sudah melalui Pertimbangan dan Aspek penilaian. Berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana terdapat beberapa masalah dalam dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa indikator sebagaimana yang di kemukakan oleh K. Bertens bahwa Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat, oleh sebab itu peneliti menganggap bahwa indikator sebagaimana yang di kemukakan oleh K. Bertens bahwa Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. hal ini banyak dikemukakan oleh masyarakat. Serta prinsip – prinsip dalam etika seharusnya menuntun setiap orang untuk menjadi sebh baik.

Saran

1. Sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana Bupati adalah Simbol dari pemerintah Daerah yang ada semakin lebih mencerminkan keragaman dan menjunjung tinggi harkat dan martabat daerahnya dalam berperilaku, berbuat dan bertindak dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat melaksanakan setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sesuai
- Aturan yang berlaku dan sepengetahuan Pimpinan yang lebih tinggi, yang diharapkan sehingga antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dan masyarakat terjalin sinergitas dan Pelaksanaan aturan yang tepat.
2. Pemerintah Daerah di kabupaten/ kota dalam struktur Ketata negaraan merupakan Bawahan Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi, hendaknya penyusunan rencana kegiatan dan Pelaksanaan Pemerintahan sesuai dengan Aturan Perundang – undangan dan sepengetahuan Pimpinan yang lebih tinggi dalam melakukan tugas pemerintahannya.
3. Kepala Daerah haruslah terus menjadi contoh dan teladan serta menjadi alat pemersatu dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menghargai Nilai – nilai penyelenggaraan pemerintahan dan Norma – norma moral yang terkandung di masyarakat. Oleh sebab itu Kepala daerah haruslah Beretika, karena dengan Menghargai dan mematuhi peraturan adalah awal wibawa seorang PNS, Pejabat dan Pemimpin itu dapat menjalankan Amanah dalam peoses penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan sebaik – baiknya.
4. Kepala daerah haruslah menjadi pamong bagi Pemerintahannya, baik Instansi, Masyarakat dan lainnya. Pamong adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pamong memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pamong dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

5. Kepala Daerah harus berperilaku dan menjalankan Prinsip – prinsip Penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pertama, prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu sistem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau dianut oleh suatu Negara Bangsa sebagai satu kebijakan, seperti Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Devolusi, Parlemenair, Presidensiil.
6. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih khususnya Gubernur selaku kepala daerah provinsi bahwa dalam pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik hendaknya dapat memberikan teguran dan bimbingan kepada setiap kepala Daerah yang bermasalah dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan tidak ada unsur nepotisme sehingga bisa menciptakan gesekan antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah daerah provinsi terlebih kepada masyarakat sehingga segala bentuk keputusan tidak hanya dilakukan semaunya dan semata – mata sesuai kemauan pribadi kepala daerah tersebut tanpa melihat Regulasi dan Aturan yang mengikat Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh dan teladan untuk masyarakatnya terlebih citra yang baik untuk Pemerintah Pusat dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan terpatuhnya setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin keberlangsungan dan baiknya stabilitas jalannya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bertens, K. (2013). *ETIKA*, Yogyakarta: Kanisius.
- C.F. Strong, 2012, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Eisting Form (KonstitusiKonstitusi Politik Modern; Study Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie), Nusamedia, Bandung.
- Darmastuti, Rini. 2007. *Etika PR dan E-PR*. Gava Media. Yogyakarta
- Emriz, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Gordon, Thomas. 1996. *Mengajar Anak Berdisiplin Diri di Rumah dan di Sekolah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Imam, Moejiono, 2002, *“Kepemimpinan dan Keorganisasian”*, Yogyakarta, UII Press.
- Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2008. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Miles, M. B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.

- Terjemahan
Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Peter G. Northouse, *Kepemimpinan*.
Jakarta : PT Indeks Permata Puri
Media
- Poerwadarminta, W.J. S. 2005.
Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Jakarta:
PN Balai Pustaka.
- R.M Mac Iver, *The web of government*,
The macmillan, New York,
1951 Hal 147-174.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2009.
*Kepemimpinan Pemerintahan
Indonesia*. Jakarta: PT
Rafika Aditama.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika
Sejak Zaman Yunani Sampai
Abad – 19*
Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Tead, Terry, Hoyt (dalam Kartono.
2003). *Beyond Leadership (12
konsep
kepemimpinan)*, PT Elek Media
Komputindo, Jakarta.